



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 18 (<i>delapan belas</i>)
Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
Hari, Tanggal	: Kamis, 31 Maret 2022
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Aria Bima/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F.PDIP
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Membahas Mengenai : 1. Kinerja KPPU dalam penanganan perkara larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 2. Kinerja BPKN dalam memberikan perlindungan konsumen.
Hadir	: 1. 33 orang dari 53 Orang Anggota Komisi VI DPR RI 2. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Saudara Ukay Karyadi, S.E., M.E. 3. Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Saudara DR. Rizal E. Halim. beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka RDP VI DPR RI dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), pada pukul 10.32 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. RDP Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 31 Maret 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional agar ikut serta dalam mengawasi keberadaan stok, distribusi dan stabilitas harga pangan dan bahan pokok, khususnya dalam menghadapi bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022/1443 H
2. Komisi VI DPR RI meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk memonitor perilaku pelaku usaha bidang pangan demi menjaga persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen.
3. Komisi VI DPR RI mendukung penguatan Lembaga dan Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang wajib diimbangi dengan kinerja yang lebih baik.
4. Komisi VI DPR RI mengusulkan agar adanya Undang-Undang yang mengintegrasikan Undang-Undang persaingan usaha yang sehat dan Undang -Undang perlindungan konsumen.
5. Komisi VI DPR RI meminta agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberikan sanksi tegas berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang, khususnya pelaku usaha di bidang pangan.
6. Komisi VI DPR RI meminta kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan kartel dan penggunaan dana BPDPKS sebesar 7,6 T dengan klaim untuk atasi kelangkaan minyak goreng.
7. Komisi VI DPR RI meminta kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk terus mengawasi kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat terutama terkait kenaikan harga/penurunan harga komoditas barang pokok dan barang penting yg tidak wajar.
8. Komisi VI DPR RI meminta kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional agar memastikan pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha untuk proaktif dalam upaya perlindungan konsumen

serta lebih meningkatkan peran dalam merespon dinamika dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat.

9. Komisi VI DPR RI meminta kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

10. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.00 WIB.

**KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA (KPPU)**

Ttd.

UKAY KARYADI, S.E., M.E.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**ARIA BIMA
A-189**

**KEPALA BADAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN NASIONAL (BPKN)**

Ttd.

DR. RIZAL E. HALIM